

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bawono, Anton, dkk, *Ekonometrika Terapan, Untuk Ekoonomi dan Bisnis Islam, Aplikasi Eviews*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2018.

Beik, Irfan Syauqi, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga, 1978.

Fauzan, Muhamad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Firdausy, Carunia Mulia, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.

Halim, Abdul, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Huda, Nurul, *Kebijakan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Jinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

Mangkoesubroto, Guritno, *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: FE UGM, tt.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*, Yogyakarta: ANDI, 2018.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.

Nachrowi, Djalal Nachrowi, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2017. Cetakan ke empat.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2016, Cetakan ke sembilan.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cetakan ke dua belas.

Winarmo, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews Edisi-4*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

## **JURNAL**

Rinanda, Teja dan Subambang H, *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara,*. Jurnal Ekonomi Hukum dan Humaniora, Vol. 1. No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana, 2020.

Lustianah, Meri, *Pengaruh Alokasi Pro Poor Budget Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Variabel Pendapatan Daerah Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*, Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1 No. 2, 2016.

Sari, Ida Ayu Candra Yunita dan Ni Luh Supadmi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, 2016.

Sarkoro, Hastu dan Zulfikar, *Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintha Provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014)*, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1), Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Widarwanto, Atanasius, Erlina dan Idhar Yahya, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap Ipm Dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel*, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 7 No.2, Universitas Sumatera Utara, 2014.

### **WEBSITE**

Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2013*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:52.

\_\_\_\_\_. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2014*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:50.

\_\_\_\_\_. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2015*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:46.

\_\_\_\_\_. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2016*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:44.

\_\_\_\_\_. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2017*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:42.

\_\_\_\_\_. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2018*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:39

\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2013*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:53.

\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2014*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:18.

\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2015*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 13:57.

\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2016*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 13:44.

\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2017*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:27.

\_\_\_\_\_ . *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2018*. Diunduh melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 3 Juli 2020. Pukul 14:28.

\_\_\_\_\_ . *Statistik Daerah Banten tahun 2019*. Diakses melalui [www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id) pada 10 Oktober 2020. Pukul 10.05 WIB

Peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.